

# Peran Elit Desa dalam Partisipasi di Tingkat Lokal dalam Perumusan Musrenbang di Desa Blahbatuh Kabupaten Gianyar

I Putu Wahyu Mantrawan<sup>1)</sup>, Piers Andreas Noak<sup>2)</sup>, Tedi Erviantono<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: [wahyumantrawan@gmail.com](mailto:wahyumantrawan@gmail.com)<sup>1)</sup>, [andreasnoak@fisip.unud.ac.id](mailto:andreasnoak@fisip.unud.ac.id)<sup>2)</sup>, [TedyErviantono@unud.ac.id](mailto:TedyErviantono@unud.ac.id)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*This research is motivated by the position and the role of the village elite in influencing the formulation musrenbang in Gianyar Blahbatuh village. Non government elite into a figure capable of mobilizing the community so as to create social dynamics that will affect resultant force on the formulation of policies between the ruling elite and the local elite in the village Blahbatuh. The purpose of this study seeks to dissect the participation of the local community to the village elite in relation to the formulation musrenbang Blahbatuh village. This study uses qualitative research methods - the descriptive study using a model of Bungin. Engineering research data collection is done by direct observation, and literature that have relevance to the theme of the research as well as assign a resource by interviewing community leaders non - government and aperture Blahbatuh villages and rural communities. The research proves that the villagers Blahbatuh have a high level of political consciousness it is proved that the village administration is part of the local community so that the synergy between the government, the elite non - government and community berasas democratic, rational, interactive and transparent. Local elites non - government became an influential figure in the formulation typically musarembang not only suggest policy proposals alone but actively conduct political lobbying in policy development processes as well as determine the direction of policy.*

**Keyword:** Musrenbang, Elit, Society

## PENDAHULUAN

Pengelenggaraan musrenbang di desa Blahbatuh kabupaten Gianyar hingga saat ini sangat partisipatif. Hal ini tidak serta merta terjadi begitu saja karena kedewasaan politik masyarakat Desa Blahbatuh membawa suatu tolak ukur yang baik dalam ranah yang bersifat demokratis pada sektor publik.

Pentingnya peran partisipasi dan transparansi dari masyarakat dikarenakan

beberapa faktor kasus yang sering diakibatkan dari sebuah lemahnya mekanisme pelaksanaan dan perumusan di dalam Musrenbang Desa / Kelurahan, seperti halnya pesertanya mencakup perwakilan komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan itu sendiri, seperti: ketua RT/RW; kepala dusun, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha,

kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain. Sedangkan sang Kepala Desa/Lurah, Ketua dan para Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) hanya bertindak sebagai narasumber, sebagaimana halnya Camat dan aparat kecamatan seperti Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, para pejabat instansi yang ada di desa atau kecamatan, dan juga LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.

Akibat dari kelemahan itu praktek mekanisme musrenbang tersebut maka Musrenbang berpotensi gagal Desa/Kelurahan gagal yang mencapai tujuan idealnya, yakni, pertama, untuk menampung dan menetapkan kegiatan yang berada dalam kategori prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya yaitu (Musyawarah Dusun/kelompok). Kedua, apabila menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana yang bersumber dari Desa/Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan yang berasal dari lainnya. Serta yang ketiga, menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk segera dibahas pada Forum Musrenbang ditingkat Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota atau APBD Provinsi).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti tentang bagaimana para tokoh desa yang memiliki andil dalam memberikan sebuah masukan dalam pengambilan keputusan melalui

partisipasinya serta transparansi dari masukan dan pengambilan keputusan tersebut sudahkah mampu menyentuh sektor riil yang terjadi dari apa yang menjadi kepentingan dan juga kebutuhan masyarakat dikarenakan walaupun musrenbang sendiri dinyatakan memberikan ruang terbuka untuk menampung aspirasi masyarakat, tidak dapat dipungkiri juga bahwa tokoh desa didalam masyarakat masih juga memiliki peran yang penting dan juga signifikan.

Untuk itu penulis berupaya melakukan penelitian di desa Blahbatuh dikarenakan desa Blahbatuh juga merupakan salah satu desa yang saat ini mengalami modernisasi baik dari cara hidup dan cara pandang para masyarakatnya, dengan adanya modernisasi ini apakah akan mempengaruhi partisipasi dan transparansi dari para tokoh desa Blahbatuh itu sendiri dalam pengambilan keputusan yang mana memiliki masyarakat yang modern.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kelompok Elit Dalam Demokrasi**

Manusia sejak lahir dibekali dengan Hak dan Kewajiban. Adanya hak dan kewajiban yang dijalankan melahirkan perbedaan kedudukan dan status, baik secara horizontal maupun vertical (Rivai,1981). Perbedaan horizontal menekankan pada aspek jenis kedudukan satu dengan yang lainnya, mewujudkan gejala deferensiasi social. Perbedaan vertical

yang menekankan aspek tinggi rendahnya kedudukan sehingga tercipta adanya ranking (hierarkis) akan mewujudkan gejala stratifikasi social atau lapisan sosial(Sorokin,1959).

### **Elite Lokal dalam Pembangunan Desa**

Kelompok elite local sangat potensial sebagai agen pembaharuan, terutama dalam fungsinya sebagai jembatan antara kemauan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Mereka yang termasuk elite local bukan hanya dari golongan governing elite, akan tetapi non-governing elite juga kerap tampil sebagai figure potensial dalam memobilisasi masyarakat, menyampaikan gagasan, keluhan dan permintaan anggota masyarakat(Ufford, 1988).

Partisipasi dalam mengambil keputusan merupakan pernyataan pikiran atau emosi ke dalam situasi kelompok yang mendominasi untuk menyumbangkan kemampuan dan ikut bertanggung jawab atas kelompok itu(Westra, 1980:21). Kekuasaan untuk mengambil keputusan tidak semata-mata oleh jabatan formal dari kedudukan elite.Akan tetapi elite diluar itu karena memiliki keunggulan dalam bentuk nilai-nilai yang mereka bentuk mendapat nilai tinggi dalam kehidupan masyarakat, juga sangat berperan.Nilai yang dibentuk dapat berupa kekuasaan, kejayaan, kehormatan, pengetahuan lain-lainya.Dari sini individu-individu yang berhasil memiliki sebagian

besar nilai-nilai tersebut menurut laswel, terlibat secara aktif dalam bidang pengambilan keputusan (Laswel dalam Haryono: 1990:16).

### **Identifikasi Elite Lokal**

Keberadaan elite local saat ini juga sangat dipengaruhi oleh factor structural dan organisasional (Pareti dalam Bottomoro, 1985).Keberadaan Elite local pada masa kini meliputi mereka yang berada pada birokrasi pemerintah (governing elite) yaitu mereka yang dimasukkan sebagai kelompok elite karena menduduki jabatan penting dalam organisasi pemerintahan Desa (bersifat formal).Elite semacam ini memiliki pengaruh dan kekuasaan karena mendapatkan legitimasi dari pemerintahan yang lebih atas (Supralokal).Disamping itu di dalam masyarakat berkembang juga kelompok elite diluar itu (Nongoverning elite), seperti para bangsawan, tokoh-tokoh adat dan agama yang mendapatkan legitimasi dari adat dan agama, orang kaya desa dan pegawai negeri. Mereka dikategorikan elite karena kapasitas personal, kemampuan dan pengetahuan adat dan agama yang dimiliki serta kekayaannya, sehingga dianggap memiliki kelebihan dan selalu menjadi panutan sikap dan kompas tindakan bagi masyarakat

### **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif - kualitatif.Penelitian ini

juga menjelaskan serta mendeskripsikan, menyelidiki dan juga memahami secara empiris tentang Peran Elit Desa dalam Partisipasi di Tingkat Lokal dalam Perumusan Musrembang di Desa Blahbatuh, Gianyar. Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah data - data primer dan juga data - data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi langsung, juga dengan wawancara dan dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling yakni *purposive sampling*. Penelitian ini berlokasi Kabupaten Gianyar. Provinsi Bali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Blahbatuh sendiri dikenal menonjol dalam melibatkan para masyarakat desanya dalam proses penetapan sebuah kebijakan publik. Hal ini dikarenakan dalam Perumusan Kebijakan Musrenbang Desa yang juga mengatur tentang peran partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik itu sendiri dimana setiap individu diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan sebuah keputusan atau sebuah kebijakan publik. Agar hak partisipasi dapat tetap terjaga dan berjalan dengan baik, Pemerintah Desa Blahbatuh menyediakan banyak informasi publik secara transparan, guna mendorong tingkat partisipasi, yang bersifat responsif aktif.

Untuk dapat menampung aspirasi melalui partisipasi aktif para masyarakat, Pemerintah desa Blahbatuh membentuk sebuah Komisi yaitu disebut dengan Partisipasi yang merupakan lembaga yang bersifat independen yang dibentuk tak lepas dengan persetujuan Perangkat Desa. Komisi ini juga bertugas mengawasi tiap pelaksanaan partisipasi serta dapat memberikan masukan untuk bahan pertimbangan dalam sebuah pembuatan kebijakan publik. Komisi Partisipasi juga berkedudukan di bawah Kepala Desa dan mempunyai dibekali fungsi, yaitu: a) untuk Menampung, memadukan dan merumuskan serta menyampaikan pemikiran dan pendapat masyarakat sebagai buah bentuk partisipasi untuk nantinya disalurkan kepada pihak yang terkait; b) Melakukan upaya pembinaan dan juga pengawasan terhadap tiap pelaksanaan partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas, efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan partisipasi untuk masyarakat; dan c) Melakukan mediasi segera untuk menyelesaikan pengaduan atas berbagai keberatan masyarakat karena partisipasinya ditolak.

Partisipasi masyarakat dilaksanakan berdasarkan atas asas: a) Kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan; b) Rasionalitas, efisiensi, tepat guna, dan tepat harus sasaran; c) Sesuai dengan norma, prosedur, dan juga etika sosial yang tetap berlaku; dan d) Tanggap,

serta terbuka, dan penuh kesungguhan. Peran partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan public juga meliputi Perumusan visi dan misi, rencana strategis, dan program - program lainnya seperti pembangunan desa; Penyusunan rencana serta tahapan pembanguan tahunan desa; Penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja desa. Penyusunan maupun revisi mengenai tata ruang desa; Penyusunan peraturan - peraturan desa; Penyusunan aturan desa yang berkaitan dengan pembangunan itu sendiri dan pelayanan umum seperti perizinan serta perubahan tarif, dan hal lain-lain Pengawasanjuga monitoring, dan evaluasi tahap pelaksanaan suatu kebijakan atau program; Dan hal lain-lain perumusan keputusan atau kebijakan publik berkaitan dengan kepentingan khalayak rakyat banyak.

Partisipasi masyarakat juga dalam proses penyusunan kebijakan publik berbentuk seperti: a) Untuk mengidentifikasi berbagaimacam potensi dan masalah yang terjadi b) Juga memberikan informasi maupun saran dan pertimbangan atau pendapat dalam tahap penyusunan strategi pelaksanaan kebijakan itu sendiri c) Memberikan ruang untuk masukan dalam merumuskan sebuah kebijakan d) Mengajukan buah persetujuan dan atau keberatan terhadap rancangan kebijakan itu sendiri; dan e) Mengadakan buah kerjasama dalam sebuah penelitian maupun

perencanaan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan juga pengembangan dengan bantuan tenaga ahli.

Sedangkan hal lainnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini meliputi: a) Terlibat dalam implementasi suatu kebijakan publik b) Turur membantu tahap penyusunan atau usulan pertimbangan untuk kebijakan pembangunan yang bersifat partisipatif c) Menyelenggarakan buah kegiatan pembangunan yang juga berdasarkan kebijakan yang telah disepakati dan disetujui; dan d) Menjaga kebijakan publik.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat di tarik berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa derajat partisipasi masyarakat di Desa blahbatuh masih pada derajat tokenisme dimana masyarakat mendapat informasi pelaksanaan musrenbang dan menyampaikan usulan-usulan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.Musrenbang menjadi forum utama dalam menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan rencana kerja pembangunan Desa blahbatuh. Namun, kekuasaan tetap berada ditangan pemerintah Desa blahbatuh dalam mengambil keputusan atas rencana kerja pembangunan daerah yang dihasilkan

Musrenbang merupakan ajang dimana setiap masyarakat secara individual diberikan ruang dalam menyampaikan semua

gagasan dan ide yang ada di dalam masyarakat Blahbatuh, dalam musrenbang mereka tidak hanya dituntut untuk mmengutarakan sebuah gagasan, mereka pun dituntut untuk berani melakukan penolakan jika bagi mereka sebuah ide/gagasan tidak relevan untuk dilaksanakan.

Musrenbang memberikan ruang bagi Masyarakat Blahbatuh untuk melakukan pengawasan terhadap ide atau gagasan, pengawasan akan berhasil tidaknya sebuah project akan mereka sampaikan ada saat forum ,musrenbang dilakukan, pengawasan masyarakat membantu pemerintah dalam mengerjakan proyek - proyek selanjutnya, apakah proyek tersebut baik yang sudah berjalan, akan berjalan dan telah berjalan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan keputusan dan hasil yang dinanti oleh masyarakat.

Walaupun di dalam Pelaksanaan Musrenbang terdapat kekuasaan Government dan Non Government, tetap saja sedikit kemungkinan yang dapat dilakukan oleh kedua kelompok kepentingan tersebut untuk mengintervensi keputusan musrenbang , hal ini dikarenakan dua kelompok kepentingan tersebut sama-sama meyakini bahwa walaupun mereka tergolong elite mereka tetaplah kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut.

Sehingga walaupun kadang mereka diberikan kedudukan khusus oleh masyarakat, seperti permintaan akan sebuah

gagasan, mereka hanya sebatas memberikan ide, dan tidak melakukan intervensi bahwa ide tersebut harus dilakukan.

Kedudukan usulan masyarakat dalam penyusunan musrenbang Desa blahbatuh dinilai sangat kuat dimana banyaknya usulan masyarakat yang disampaikan saat musrenbang walaupun mempunyai keterbatasan anggaran dan pelaksanaan musrenbang desa yang hanya dilaksanakan selama satu hari tidak menjadikan masyarakat menyampaikan aspirasi pada kepentingan pribadi melainkan penyampaian aspirasi pada kebutuhan masyarakat luas. Namun, Pemerintah Desa blahbatuh tetap berupaya untuk mengakomodir dan memprioritaskan usulan masyarakat yang disampaikan melalui forum musrenbang

#### **DAFTAR PUSTAKA:**

- Abu, Rivai (ed). 1998. *Sistem Kesatuan Hidup Stetmpat Daerah Bali*. Jakarta: Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Bali, Depdikbud.
- Abdul Hafiz Tanjung. (2011). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)*. Bandung: Alfabeta.
- Ardianto, Elvinaro. 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung : Simbosa Rekatama Media

- Bottomoro, T.B. 1985. *Elites and Heterogenity, A Primitive Theory Social Struktire*. New York: The Free Press, A division of Mc. Millan Publishing Co, Inc.
- Cahyono, Heru (Ed.), 2005, *Konflik Elit Politik Pedesaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Krina, P Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi Sekretariat Good Public Governance*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Masyur, Amin (ed). 1988. *Kelompok Elite Hubungan Sosial Pedesaan*. Jakarta: YIIS, Pustaka Grafika Kita.
- Putnam, Robert, D. 1976. *The Comparative Study Of Political Elites*. Eanglewood Cleffts, N. J: Prentice Hall.
- Schoorl, J.W. 1980. *Moderinisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara- Negara sedang Berkembang* (Terjemahan R.G. Soekadijo). Jakarta: PT Grammedia.
- Sumiman Udu, 2012. *Pertautan Kepentingan Antarelit (Disampaikan dalam seminar Regional dan Musyawarah Daerah Se-Sultra Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se-Indonesia di Aula Hotel Wakatobi)*.
- Soekanto Soerjono. 1977. *Kumpulan Istilah-istilah Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia.
- Singh, Avter. 1973. *Leadership Petterns and Village Struktire, A Study of Six Indian Villages*. New Delhi : Sterling Publishers PVT LTD.
- Sutherland, Robert. 1961. *Introductory Sociology*. New York.
- Santoso, Purwo (Ed.), 2003, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sy Pahmi.2010. *perspektif baru antropologi pedesaan*. Jakarta : Gaung Persada Press (GP Press).
- SKRIPSI, Hakim Samsul. 2008. "peranan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa paokmotong kecamatan masbagik" nomor mahasiswa : 205.315/ spp. Jurusan : ilmu pemerintahan. program studi: ilmu pemerintahan.fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas 45 mataram2008.
- Undang- Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang- Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Desa.

Undang- Undang Republik Indonesia No  
12 Tahun 2008 tentang  
Pemerintahan Daerah.

Usman Sunyoto. 1991. Elite Desa dan  
Pembangunan (Laporan hasil  
Penelitian), Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Proyek Pengembangan Pusat  
Fasilitas Bersama Antar  
Universitas (Bank Dunia XVII) PAU  
Studi Sosial, Universitas Gadjah  
Mada, Yogyakarta.

Ufford, Philip, Quarles Van (ed). 1988.  
*Kepemimpinan Lokal dan  
Implementasi Program*. Jakarta:  
PT Gramedia.

Westra, Pariata. 1980. Pokok-pokok  
Pengertian Manajemen.  
Yogyakarta:Penerbit Administrasi,  
UGM.

Wisnumurti, Oka, Anak Agung Gede.  
2008. *Elite Lokal Bali*. Denpasar:  
Arti Foundation.

Yusron. 2009. *elite local dan civil society*.  
Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia

## **WEB**

Diakses dari

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1533> 6 Mei 2016, pukul 22.30

WITA